



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 13637-13648

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kerjasama Intelijen Terhadap Ancaman Dari Luar (Studi Kasus *Brot Für Die Welt*)

Mujahidin Nuryadi^{1✉}, Muhammad Syaroni Rofii²

Universitas Indonesia

Email :

Abstrak

Kajian pada tulisan ini membahas tentang pentingnya kerjasama intelijen Indonesia terhadap ancaman yang datang dari luar negeri. Penelitian yang dilakukan mengkaji tentang kehadiran *non-government organization* (NGO) asing, *Brot Fur Die Welt* (BFDW) yang beroperasi di Papua, dan beberapa wilayah lain di Indonesia. NGO asing BFDW juga memberikan pelajaran politik ideal mengenai bagaimana regulasi atau kebijakan sebuah negara terhadap NGO Asing. Jenis penelitian ini adalah penelitian hubungan internasional dengan konsep globalisme dari Manfred Steger (2009). Metode penelitian adalah kualitatif. Data dikumpulkan dari buku, media massa, jurnal, dan laporan penelitian tentang pembahasanyang berkaitan dengan BFDW. Teori yang digunakan untuk menganalisa data adalah teori analisis jaringan hubungan internasional. Temuan penelitian: pertama, NGO asing BFDW telah hadir di Indonesia sejak 2011 dan telah membangun kemitraan di berbagai bidang dengan NGO-NGO lokal, seperti AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional), JERAT, YADUPA (Yayasan Dusun Pusaka), JUBI (Jujur Bicara), JDP (Jaringan Damai Papua), YPKM (Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat) dan lain-lain. Kedua, tidak seluruh LSM yang didanai oleh BfdW bisa menjadi mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Kata Kunci: *Kerjasama Intelijen, BfdW, dan Ancaman*

Abstract

The study in this paper discusses the importance of Indonesian's intelligence cooperation against threats coming from abroad. The research conducted examines the presence of foreign non-government organizations (NGOs), Brot Fur Die Welt (BFDW) operating in Papua and several other regions in Indonesia. Foreign NGOs BFDW also provides ideal political lessons on how a country's regulations or policies are towards foreign NGOs. This type of research is international relations research with the concept of globalism from Manfred Steger (2009). The research method is qualitative. Data were collected from books, mass media, journals and research reports that discussed BfdW or were related to BfdW. The theory used to analyze the data is the theory of international relations network analysis. Research findings: first, the foreign NGO BFDW has been present in Indonesia and has built partnerships in various fields with local NGOs, such as AMAN (National Indigenous Peoples Alliance), JERAT, YADUPA (Dusun Pusaka Foundation), JUBI (Honestly Talk), JDP (Papua Peace Network), YPKM (Public Health Development Foundation) and others. Second, not all NGOs funded by BfdW can become government partners in carrying out development.

Keywords: *Intelligence Cooperation, BfdW, and Threats*

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, secara geografis terletak pada posisi strategis yakni di persilangan antara dua benua dan dua samudera. Karena letak geografisnya yang strategis dan besarnya luas perairan, Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia, menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang berdampak terhadap instabilitas baik di dalam negeri maupun kawasan (Buku Putih Pertahanan 2015). Dengan demikian untuk mendapatkan pengakuan hukum atas konsep negara kepulauan, maka perlu adanya kerjasama tingkat multilateral di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak tahun 1960-an Pemerintah Indonesia telah melaksanakan perundingan dan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka melindungi dan memajukan kepentingan nasional Indonesia di wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga termasuk perlunya kerjasama intelijen untuk menangkal berbagai ancaman dari luar.

Kerjasama intelijen akan memberikan dampak dan kontribusi yang positif dalam penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara tetangga, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dalam konteks hubungan internasional, bentuk kerja sama Indonesia terhadap negara lain merupakan suatu wujud konsistensi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjunjung tinggi asas

penyelesaian sengketa secara damai terhadap ancaman dari luar. Kondisi itu pun dipengaruhi dengan hadirnya NGO asing, BFDW (Brot Fur Die Welt), sebuah NGO asing yang berbasis di Caroline-Michaelis STR 1, Jerman dan beroperasi di Papua yang melakukan kerjasama dengan berbagai NGO lokal : JUBI (Jujur Bicara), JERAT (Jaringan Kerja Rakyat) Papua, YADUPA (Yayasan Dudun Pusaka), JDP (Jaringan Damai Papua), juga YPKM (Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat).

Dalam website resminya, BFDW mempunyai misi *dignity for all human kind* karenanya fokus BFDW adalah aktif melakukan pembangunan global melalui program-program BFDW, memberdayakan masyarakat miskin dan kelompok termarginalkan untuk meningkatkan standar kehidupan mereka. Terkait isu Papua, terdapat dua proyek yang dikerjakan BfdW. Proyek pertama dengan tema "Information Network for Civil Society Advocacy in West Papua, Continuation" sampai dengan tahun 2023.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk berkontribusi dalam memastikan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat, dengan akar penyebab ketidakadilan ditangani dengan cara non-kekerasan melalui upaya kolektif dari organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia. Selain itu, bertujuan untuk memperkuat dan memberi kapasitas pada kelompok sipil masyarakat adat dan aktivis di bidang hak asasi manusia dan advokasi.

Selain di Indonesia, BFDW juga menjadi lembaga konsultan untuk wilayah Pasifik, seperti Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Barat, Filipina dan India. Beberapa negara tersebut telah memperoleh kemerdekaan politik, seperti Fiji pada 1970 dan Papua Nugini pada 1975. BFDW juga menciptakan organisasi Pacific Conference of Churches (PCC) tahun 1961. Pada tahun 2022, PCC ini telah mengupayakan pemboikotan produk-produk Indonesia juga program dari pemerintah Indonesia sampai pemerintah Indonesia memberikan akses kepada komisi HAM PBB untuk menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua. (Uniting Church, 14 Desember 2022)

Cara kinerja BFDW di Indonesia ini serupa dengan LDS Church yang beroperasi di Amerika Latin. LDS Church merupakan NGO yang berasaskan nilai-nilai agama, yaitu Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints (LDS Church), diserang karena dinilai memiliki kedekatan politik dengan pemerintah Amerika. LDS Church ini bertempat di Salt Lake City, Utah, US. Secara lahiriah, mereka menyebut tidak berpolitik. Namun, tindakan-tindakan nyata mereka menunjukkan sarat kepentingan politik, dan tidak bisa ditoleransi (Stapley, 2014). Organisasi non-pemerintah ini akan tumbuh subur apabila pemerintah di suatu negara dinilai tidak progresif dalam menangani masalah rakyatnya.

Banyaknya LSM asing di Papua, menurut mantan Wakil Kepala BIN As'ad Ali menjadi

pertanda banyaknya operasi intelijen di wilayah tersebut. Tentu saja salah satu hal yang menjadi target mata-mata adalah kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Hal seperti ini juga terjadi pada gerakan separatisme di Aceh, dia menyebut secara tidak langsung ada peranan intelijenasing (Sumandoyo, 2016). Leonard Imbiri mengutip kata-kata Barnabas Suebu (mantan gubernur Papua) bahwa Papua Barat telah melewati 150 tahun bersama ajaran Injil. Hari ini, mereka butuh makan, butuh perlindungan dan kepemilikan atas tanah. Mereka butuh pemulihan, pembebasan dari ketidakadilan dan ketidakpastian. Inilah waktunya memberi makan mereka dan memenuhi ajaran kita. Ini adalah tugas bersama kita (Hamlyn, 2013).

Kompleksnya permasalahan di Papua sejatinya harus diimbangi dengan penguatan kerjasama dari lembaga-lembaga negara yang bersangkutan, di antaranya adalah lembaga intelijen. Kerjasama Intelijen dalam penanganan permasalahan ancaman dari luar mutlak diperlukan. Pada kasus terorisme kerjasama intelijen dalam penanganan terorisme sudah sangat lumrah, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Karena terorisme bukan isu politik nasional negara tertentu disamping terorisme merupakan musuh bersama. Sebagai contohnya ada beberapa negara tetangga yang bukan hanya memberikan dukungan ke Indonesia tetapi menjalani jalinan kerjasama dalam pemberantasan terorisme.

Kerjasama pertahanan yang digeluti di renggangan Malaka ini digeluti dalam peralihan intelijen alias *Intelligence Exchange Group* (IEG) selaku lini awal kebolehan pertahanan antara Indonesia, Malaysia serta Singapura selaku negeri pesisir laut (littoral states) disepanjang renggangan Malaka (Thomas HK, 2017). Dari penjelasan tentang intelijen dan ancaman dari luar melalui Brot Für Die Welt, menarik untuk dianalisis kenapa Intelijen Indonesia membutuhkan sinergitas dan kerjasama dalam mengatasi kerawanan dari luar dan bagaimanabentuk kerjasamanya, dengan mengangkat judul "Kerjasama Intelijen Dalam Menghadapi Ancaman Dari Luar (Studi Kasus Brot Für Die Welt (BFDW)).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penelitian akan dilakukan dengan metode metode kualitatif. Sebuah metode penelitian yang bertujuan guna mendapatkan pemahaman pada fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain melalui deskripsi kata-kata dan bahasa dengan menggunakan metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2011). Sementara jenis penelitian yang di gunakan merupakan studi kasus yang fokus pada kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas (Fitrah & Luthfiyah, 2017). Kasus yang diangkat di sini adalah *Brot fur Die Welt*

(BFDW) yang beroperasi di Papua. BFDW diamati dan dianalisis dalam kaitannya dengan aktivitas mitra-mitranya (LSM-LSM lokal Papua) dalam menciptakan opini publik bahwa kebijakan pemerintah Indonesia di Papua telah gagal, serta dalam kaitannya dengan Strategi Kerjasama Badan Intelijen Negara dalam menghadapi ancaman dari luar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi *BROT fur die WELT* BfdW merupakan organisasi yang berada dibawah naungan EWDE (Protestant Agency for Diakonie and Development (EWDE) sebuah organisasi yang berafiliasi dengan gereja Katolik di Jerman yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin, termarginalisasi dan juga membangun perdamaian. Menurut Teori hubungan internasional. Emile M. Hafner-Burton, Miles Karler, dan Alexander H. Montgomery (2009) bahwa hubungan internasional adalah tentang jaringan dimana model organisasi tertentu berbeda dari pasar maupun hirarki negara.

Analisis ini melibatkan potensi ancaman dari luar dalam melindungi keamanan. Sehingga melalui Brot Fur Die Welf bisa diterapkan. Analisis jaringan ini mengizinkan investigasi dan pengukuran struktur jaringan, seperti pola-pola relasi di antara agen-agen yang terlibat. Analisis jaringan memungkinkan pembicaraan tentang struktur jaringan, serangkaian teori, yang dikontekskan dengan relasi internasional. Ada dua isu pokok dalam analisis jaringan ini, yaitu: pertama, kemampuan setiap aktor meningkatkan kekuatan mereka dengan memperkaya dan dan mengeksploitasi posisi jaringan, dan kedua, fungitabilitas kekuatan jaringan.

Ahmad Zaenal Huda, Direktur 32 BIN mengatakan:

“Dalam melakukan kerjasama ada beberapa bentuk yang biasa dilakukan intelijen; pertama pembentukan satuan tugas atau SATGAS untuk penanganan kasus tertentu. Satgas ini sifatnya temporal sesuai dengan kebutuhan kasus. Di Papua banyak sekali SATGAS yang dibentuk oleh intelijen sesuai dengan kebutuhan dan target operasi mereka”.

Menurut Zainal Huda, semua kerjasama terkait entitas asing yang dikoordinasikan bersama di TPOA (Team Pengawasan Orang Asing) Kemenlu adalah LSM-LSM yang teregistrasi di Kementerian LuarNegeri, namun untuk LSM-LSM yang tidak teregistrasi BIN menyampaikan temuan- temuannya kepada TPOA kemudian hasil dari temuan-temuan tersebut dibuat dalam nota dinas untuk ditembuskan kepada Kedubes Jerman di Indonesia maupun kepada pemerintah Jerman melalui Kedubes Indonesia di Jerman. NGO merupakan proxy Intelijen. Mereka (NGO) beroperasi dengan tujuan-tujuan strategis yang sudah dikonsep oleh user-user mereka dengan program-program yang sudah mereka

persiapkan. Dalam setiap program itu terselip agenda-agenda internasional dan pada waktu yang sama tentu saja terjadi pelemahan kepentingan-kepentingan nasional. Karenanya, penanganan bahaya laten NGO, tidak bisa dilakukan oleh satu instansi semata-mata. Dibutuhkan kerjasama intelijen baik dari tingkat kominfus (komunitas intelijen pusat) sampai pada level Kominda (komunitas intelijen daerah).

Penanganan ancaman NGO Asing di Indonesia, selama ini dikordinasikan oleh BIN bersama stake holder terkait dalam hal ini ; BIN, BAINTELKAM, Kemendagri dalam hal ini Dirjen Polhum, Setneg dalam hal ini dilakukan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri dalam hal ini dilakukan oleh direktorat Pengamanan Diplomatik, KEMENKUMHAM dalam hal ini dilakukan oleh Administrasi Hukum Umum. Semua instansi yang disebutkan diatas membuat sebuah forum bersama yang dinamakan TPOA (Team Pengawasan Orang Asing). Perlunya melakukan kerjasama menangani kasus ini menurut Achmad Zainal Huda, Direktur 32, adalah:

“Pertama, disemua lembaga intelijen terdapat direktorat khusus untuk penanganan orang asing disamping hal ini juga ada di beberapa kementerian. Kedua, komunitas intelijen itu dibuat untuk menyamakan persepsi pada ancaman dan langkah strategis apa yang akan dilakukan. Ketiga, BIN itu mempunyai peran sebagai kordinator intelijen. Dalam konteks ini BIN berusaha melakukan kordinasi baik melalui KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah) maupun KOMINFUS (Komunitas Intelijen Pusat)”.

Menurut Achmad Zainal Huda, Direktur 32, ketika dibuat SATGAS itu artinya masing-masing dinas intelijen memahami ATHG (ancaman, tantangan dan hambatan) yang sama terlepas dari perbedaan instansi intelijen. Memang benar TUSI (tujuan dan fungsi) intelijen itu berbeda-beda namun disemua lembaga intelijen mereka mempunyai bagian setingkat direktorat yang membidani urusan yang sama. Sehingga kordinasi mutlak diperlukan apalagi terkait segala bentuk ancaman yang mengganggu stabilitas, keamanan dan keutuhan NKRI.

Menurut Achmad Zainal Huda, Direktur 32:

“Kerjasama itu dibagi menjadi beberapa tahapan ; pertama kerjasama pada level kordinasi pimpinan, itupun biasanya dilakukan oleh pimpinan setingkat eselon satu atau eselon dua. Diluar kerjasama kordinasi terdapat forum bersama yang dimiliki oleh intelijen yaitu komunitas intelijen pusat dan komunitas intelijen daerah”.

Intelijen melalui kominfus selama ini sudah melakukan kerjasama intelijen bukan hanya dalam menangani kasus BFDW namun berbagaimacam kasus lainnya yang dianggap menjadi potensi ancaman bagi kedaulatan/keamanan NKRI. Menurutnya,

kerjasama intelijen ada yang dilakukan secara formal maupun informal. Kerjasama informal dilakukan berdasarkan kesepakatan antar HUMINT (human intelijen) masing-masing instansi ketika mereka sama-sama mempunyai tanggungjawab dalam melakukan penanganan kasus terkait keamanan atau hal-hal yang mengancam kedaulatan NKRI. Misalkan dalam kasus pengamanan G20 dimana kita sama-sama melakukan sharing informasi intelijen antara BIN dan BAIS TNI, melakukan diskusi pada informasi-informasi intelijen yang menonjol untuk kemudian hasil pendalaman dan diskusi tersebut tersebut dijadikan sebagai acuan untuk melakukan operasi bersama.

Intelijen merupakan salah satu instrumen penting bagi penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah di tingkat daerah. Intelijen juga merupakan produk yang dihasilkan dari proses pengumpulan, pengkajian, evaluasi, analisis, integrasi, dan interpretasi dari seluruh informasi yang berhasil didapatkan terkait dengan isu keamanan nasional dan stabilitas daerah.

Dengan kata lain, intelijen merupakan sari dari pengetahuan yang mencoba membuat prediksi dengan menganalisis dan mensintesis aliran informasi terkini, serta menyediakan bagi para pembuat keputusan berbagai proyeksi latar belakang serta tindakan alternatif yang dapat dijadikan ukuran dari kebijakan dan tindakan yang akan dibuat. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, intelijen berperan sebagai sistem peringatan dini dan sistem strategis untuk mencegah terjadinya pendudukan strategis yang mengancam keamanan negara.

Isu utama yang diangkat oleh BFDW dalam program-program yang mereka lakukan adalah ketahanan pangan, mempromosikan kesehatan, pendidikan, akses ke air bersih, penguatan demokrasi, menghormati hak asasi manusia, menjaga perdamaian serta keutuhan ciptaan. Dalam usahanya merealisasikan program-program tersebut BfdW berusaha mengambil langkah untuk memastikan tersedianya makanan untuk semua orang, karena menurut BFDW memerangi kelaparan merupakan sesuatu yang penting di tengah perubahan iklim dan kekurangan bahan makanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Komunitas yang dibangun oleh aktifis-aktifis katolik ini secara global melakukan kerjasama dengan jaringan ekumenis dan lembaga-lembaga lain di seluruh dunia utamanya lembaga-lembaga gereja. Melalui program-program yang mereka ciptakan BFDW berupaya untuk memengaruhi keputusan-keputusan politik sehingga lebih berpihak kepada orang-orang miskin dan mengedukasi mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

BFDW bertanggungjawab terhadap karyawan, anggota, dan patner mereka diseluruh penjuru dunia dengan berbagai program yang mereka lakukan dan senantiasa

melakukan konsolidasi internal diantara mereka untuk perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas program-program mereka. BFDW juga berusaha memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, kesetaraan jender, serta berusaha untuk menjaga lingkungan sekecil apapun itu. BFDW berusaha membuat strategi untuk menghadapi masa depan dunia yang menurutnya tidak menentu dan berusaha untuk mencari jalan alternatif pada masa depan yang tidak menentu tersebut dalam ringkasan visi dan misi mereka sebagai berikut: mensupport organisasi Civil Society, Memberikan Perlindungan bagi Para Pembela HAM dan membela siapapun yang dianiaya. (www.brot-fuer-die-welt).

Pendanaan yang diberikan oleh BFDW di Indonesia. *Brot Fiir Die Welt* atau disingkat BFDW merupakan sebuah NGO asing yang berbasis di Jerman dan beroperasi di Papua dengan melakukan kerjasama dengan berbagai LSM lokal dan lembaga-lembaga keagamaan di sana. *Brot Fiir Die Welt* yang berbasis Gereja Kristen dan mendapatkan pendanaan dari Pemerintah Jerman melalui Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/BMZ) dengan total proyek yang aktif dikerjakan di Indonesia berjumlah 15 proyek. Total dana yang didapat BFDW dari BMZ berjumlah USD 4.231.871 (Rp 61 Miliar) (MDL, 2022). *Brot Fiir Die Welt* di Papua mempunyai tujuan besar yang dikerjakan dengan melakukan kerjasama dengan beberapa entitas lokal di sana. Tujuan yang pertama yaitu bertemakan "*Information Network for Civil Society Advocacy in West Papua, Continuation*" dengan komitmen anggaran sebesar USD 812,659 (Rp 11 Miliar) sampai dengan tahun 2023. Proyek ini menyediakan pengembangan kapasitas pelaporan berita alternatif di Papua. Proyek ini juga ditujukan untuk membangun kapasitas jurnalis termasuk reporter warga dan masyarakat sipil dalam bentuk pelaporan berita yang berkualitas, manajemen informasi, dan jaringan dengan media internasional lainnya untuk tujuan advokasi. (MDL, 2022).

Ketergantungan LSM-LSM lokal pada pendanaan yang diberikan oleh funding asing termasuk di dalamnya BfdW telah berjalan secara kontinyu karena mereka tidak bisa mengandalkan bantuan dari pemerintah atau sumber pendanaan domestik yang jumlahnya sangat sedikit. Mereka juga tidak bisa untuk mengandalkan usaha-usaha yang mereka bangun sendiri untuk menghidupi roda pergerakan LSM mereka (theconversation.com). Ketergantungan LSM-LSM di Indonesia pada donor yang diberikan oleh negara-negara asing memberikan dilematisme tersendiri. Karena apabila program-program yang dijalankan oleh LSM asing ini tidak selaras dengan pembangunan di Indonesia maka seperti yang dikatakan oleh Imam Santoso, LSM asing di Indonesia sudah

tidak bisa lagi menjadi mitra pemerintah yang mendukung pembangunan nasional. Sebaliknya, LSM-LSM asing sering menimbulkan kegaduhan, provokasi, dan mempunyai agenda terselubung dengan aliran dana yang tidak jelas (Iman Santoso, 2022). Apakah pernyataan Iman Santoso itu bisa menjadi justifikasi umum atau hanya NGO tertentu saja yang dalam pandangan Iman Santoso menimbulkan kegaduhan dan provokasi.

Jenis-jenis Kegiatan yang didanai oleh BFDW

Melalui mitra-mitranya di Indonesia BfdW melaksanakan berbagai macam program yang mengacu pada program utama sebagaimana yang tercantum di dalam website BfdW. Diantara program-program yang didanai oleh BfdW diantaranya : Mendanai program penyelenggaraan Konsultasi Nasional XIV pada 25-27 Mei 2023, membangun organisasi petani yang berdaulat Kampanye Satu Bulan untuk Lingkungan yang Lebih Baik, memberikan advokasi, bantuan kemanusiaan, pelatihan, pendampingan bidang agama, hukum dan HAM. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di Gedung JUBI di Wayna, Papua, bahwa salah satu dari pendiri JUBI adalah Victor Mambor. Dalam penjelasannya mengenai JUBI, Victor Mambor mengatakan bahwa filosofi media JUBI adalah menyampaikan kebenaran adalah merupakan sebuah kewajiban.

Hadirnya ancaman ditengah kompleksitas permasalahan di Papua sejatinya harus diimbangi dengan penguatan kerjasama dari lembaga-lembaga negara yang bersangkutan, di antaranya adalah lembaga intelijen. Kerjasama Intelijen dalam penanganan permasalahan ancaman dari luar mutlak diperlukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Krido Pranomo dengan judul "*Interaction between intelligence operation and human intelligence ethics for national security: study of Free Papua Movement (OPM)*" bahwa kelangsungan operasi intelijen di Papua memenuhi unsur legalitas dan sesuai standar prinsip *Just Intelligence Model*. Kendati demikian, untuk memaksimalkan penanganan ancaman Organisasi Papua Merdeka perlu dilakukan kolaborasi kemampuan Human Intelligence seluruh lintas lembaga intelijen dalam satu komando yang integratif (Pranomo). Sehingga, dalam penanganan kasus BFDW apakah BFDW mempunyai potensi ancaman yang sama dengan NGO asing lainnya di Papua, diperlukan adanya kerjasama antara Intelijen BIN, Baintelkam dan BAIS TNI dan kementerian/lembaga terkait. Tentunya untuk menangani sampai tuntas kasus BFDW ini tidak dapat dilakukan secara mandiri. Diperlukan kerjasama antara kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan permasalahan NGO BFDW. Karena dalam hal ini baik BIN, BAIS TNI maupun BAINTELKAN tidak memiliki wewenang untuk 'menyelesaikan' permasalahan ini disamping belum ada peraturan/perundang-undangan

yang mengatur sanksi untuk NGO yang tidak terdaftar seperti BFDW yang melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam keamanan dan keutuhan NKRI dengan memberikan dukungan pada gerakan separatisme, referendum, menolak setiap kebijakan-kebijakan pemerintah di Papua.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan model LSM yang beroperasi di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori: Pertama, yayasan asing yang didirikan di luar dan kemudian beroperasi di Indonesia, seperti BfdW. Kedua, yayasan asing yang didirikan oleh orang Indonesia kemudian beroperasi di Indonesia. Ketiga, ormas-ormas lokal yang didirikan di Indonesia namun mendapatkan funding dari NGO-NGO asing yang beroperasi di luar negeri.

Dalam konteks ini BFDW yang menjadi studi kasus penelitian ini merupakan Yayasan asing yang didirikan di luar negeri namun beroperasi di Indonesia dengan menggunakan ormas-ormas lokal yang menjadi mitranya. Seperti halnya Greenpeace Indonesia, Forest People Programme, Environmental Investigation Agency (EPA).

BFDW dan NGO-NGO asing lainnya yang beroperasi di Indonesia dan tidak mendaftarkan diri di Direktorat OINP (Organisasi Internasional Non Pemerintah), rata-rata karena memanfaatkan kelemahan PP No. 59 tahun 2016. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui intelijen negara melakukan respon terhadap dampak kehadiran BFDW di Papua. Pemerintah mengusung prinsip kerjasama antar lembaga intelijen negara, termasuk kerjasama antara BIN, Baintelkam, dan BAIS TNI.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaidly Armawi Teguh Anggoro. Terorisme Dan Intelijen. *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol.-15, No. 3 2010.
- Al Araf et.al (eds.). *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua*. Jakarta: Imparsial. 2011.
- Alexander Leon. 2021. "Catatan khusus Dewan Gereja Papua untuk Pemerintah Indonesia". 9 April 2021. Link akses <https://arsip.jubi.id/catatan-khusus-dewan-gereja-papua-untuk-pemerintah-indonesia/>.
- Alexander Leon. 2021. "Selama penerapan Otsus Papua, jumlah pasukan TNI/Polri terus bertambah". 9 April 2021. Link akses <https://arsip.jubi.id/selama-penerapan-otsus-papua-jumlah-pasukan-tni-polri-terus-bertambah/>.
- Babak Akhgar and Simeon Yates. *Intelligence Management: Knowledge Driven*

- Frameworks for Combating Terrorism and Organized Crime*. United Kingdom: Springer-Verlag London Limited, 2011.
- Barry Buzan. 1991. *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War Boulder*: Lynne Rienner Publishers. Buku Putih Pertahanan. 2015.
- Bhakti, I.N. *Studi Strategi dan Intelijen*. Jawa Barat. Unhan. 2016.
- Burhan D. Magenda, *Penyiapan Pertahanan Negara Ditinjau Dari Strategi Ketahanan Nasional*, (Jakarta : FISIP UI, 23 April 2008). Hal 1-2.
- Ekspedisi Tanah Papua: Laporan Jurnalistik Kompas: *Terasing di Pulou Sendiri*. Jakarta : Kompas. 2009.
- Fitri Atur Arum. Reposisi Intelijen dalam Badan Intelijen Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang no. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia. 2016.
- Garnijanto. Kerjasama Regional ASEAN Menghadapi Isu Terorisme Internasional. *Tesis*. Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, 2003.
- Hana Hanifah. Kerjasama Intelijen Indonesia Dengan Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme Di Indonesia Periode 2015-2017. *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hiro Katsumata. *ASEAN's Cooperative Security Enterprise: Norms and Interest In ARF*. London: Palgrave McMillan, 2009.
- Harald Muller dalam W. Carlsnaes, T. R.-K. Security Cooperation dalam Handbook of International Relations dalam Pergeseran Kekuatan di Asia Timur dan Konsekuensi bagi ASEAN; Persepsi Ancaman dan Kerjasama Keamanan Regional. Analisis CSIS; Prospek dan Tantangan Keamanan Regional. 2013.
- Hendropriyono, A. *Filsafat Intelijen*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 2013.
- Jerat Papua. 2015. "Sebanyak 8 Pengurus Dewan Adat Suku Momuna, Mengikuti Workshop "Jaringan Antar Suku". Link akses <https://www.jeratpapua.org/2015/02/05/sebanyak-8-pengurus-dewan-adat-suku-momuna-mengikuti-workshop-jaringan-antar-suku/>.
- Kusnanto Anggoro, *Reformasi Sektor Keamanan, Kewenangan Negara, dan Partisipasi Publik*. Jakarta : Propatria Institute. 2005
- Martin Innes. *Policing Uncertainty: Countering Terror Through Community Intelligence and Democratic Policing*. American Academy of Political and Social Science, Vol 605: Democracy, Crime and Justice, 2006.
- Morgenthau. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Fifth Edition, Revised. New York: Alfred. A Knopf, 1978.

- Muhibat, Shafiah F (ed.). *Untuk Indonesia 2014-2019: Agenda Sosiologi Politik dan Keamanan*. Jakarta: CSIS. 2014.
- Meteray, Bernarda. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas. 2012.
- Noel Hendrickson. *Counterfactual Reasoning: A Basic Guide for Analysts, Strategists, and Decision Makers*. The Proteus Monograph Series, Volume 2, Issue 5, 2008.
- Parulian Simamora, M. *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Prasetyono, E. S. M. *Intelijen Pertahanan*. dalam A. Widjajanto, Reformasi Intelijen Negara (p. 84). Depok: PACIVIS FISIP-UI. 2005.
- Paret, Peter. *Understanding War: Essay on Clausewitz and the History of Military Power*. New Jersey: Princeton University Press. 1992.
- Sidratahta Mukhtar, *Manajemen Keamanan Negara I dan II: Perspektif Kamdagri/Kepolisian*. (Makalah FGD Propatria Institute: Jakarta, 11 September 2005)
- Sudiby. *Kerjasama intelijen antar negara-negara di kawasan ASEAN: manfaat dan resiko bagi Indonesia*. Tesis. Universitas Indonesia 2019.
- Suryawan, I Ngurah (ed.). *Tanah Papua di Garis Batas: Perspektif, Refleksi & Tindakan*. Malang: Setara Press. 2011.
- Snuwory. 2009. "Profil Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua". 07 Maret 2009. Link akses <http://snuwory.blogspot.com/2009/03/profil-ypkm-papua.html>.
- Taylor, Shelley E. *Health Psychology*. New York: McGraw-Hill Education. 2015.
- Tom Lansford. *Multinational Intelligence Cooperation a chapter in Countering Terrorism and Insurgency in 21st century: International Perspectives, volume 1-3. USA: Praeger Security International, 2007.*
- Thomas H.K. Sinaga. Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Kerjasama Intelligence Exchange Group (IEG) di Selat Malaka. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. Vol. 3, No. 1 2017.
- WETIK, Augustinus Reinhart. *Peningkatan Kerja Sama Kodim Dengan Pemda Kabupaten Karawang Dalam Membangun Jaring Intelijen Wilayah*. Tesis. Universitas Gajah Mada 2014.
- Wyn Rees. *Transatlantic Counter-Terrorism Cooperation: The New Imperative*. United Kingdom: Routledge, 2006.
- Yance Wenda. 2022. "Dewan Gereja Papua tolak rencana pemekaran provinsi di Tanah Papua". 21 Maret 2022. Jubi.Co.Id. Link akses <https://arsip.jubi.id/dewan-gereja-papua-tolak-rencana-pemekaran-provinsi-di-tanah-papua/>.